

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Farhan Najib Maddarangang  
NPP. 31.0824

Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Keuangan Publik  
Email: [farhannajib2710@gmail.com](mailto:farhannajib2710@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari, SE, MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The administration of the Gowa district government still faces issues such as the contribution of local revenue not being effective and efficient, which affects the level of regional financial performance. **Purpose:** The aim of this study is to evaluate the financial performance of the Gowa Regency local government during the fiscal years 2018–2022, to identify the factors that hinder the execution of this performance, and to explain the efforts made to achieve it. **Methods:** This research employs a qualitative method with a descriptive approach and data collection using a descriptive method with an inductive approach. Mahmudi's theory of financial ratio analysis is used in this study. The ratios include the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional dependency autonomy, the ratio of regional autonomy, and the ratio of the effectiveness of local revenue receipts. **Results:** The results of the study indicate that the fiscal decentralization ratio for Gowa Regency is low, with a ratio of less than 15% categorized as low, and the regional dependency ratio of 80% categorized as more than 50 percent. According to the calculation, due to the high contribution of transfer income to regional income, Gowa Regency has a high level of regional dependency. The regional autonomy ratio is between 0-25%, indicating that the autonomy of the Gowa Regency Government is categorized as very low, with an instructive relationship pattern over the past five years. The analysis of the ratio for the effectiveness of Gowa Regency's regional revenue receipts shows that the average number is more than 100%, indicating that the criterion is very effective in managing PAD (Pendapatan Asli Daerah or regional original revenue). **Conclusion:** The resolution of issues can be achieved by increasing and expanding income sources or components in accordance with existing potential, optimizing the collection of local taxes and fees, and enhancing local revenue through normative efforts to improve the governance of local revenue collection.

**Keywords:** Analysis, Financial Performance, Financial Ratio Analysis

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Gowa pada tahapannya masih mengalami masalah seperti kontribusi pendapatan asli daerah belum efektif dan efisien sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat kinerja keuangan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa

selama tahun anggaran 2018–2022, untuk menentukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja tersebut, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencapainya. **Metode:** Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori analisis rasio keuangan mahmudi digunakan dalam penelitian ini. Rasio tersebut terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, dan rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Gowa adalah rendah, dengan rasio desentralisasi kurang dari 15% dikategorikan rendah, dan rasio ketergantungan daerah sebesar 80% dikategorikan sebagai presentase yang lebih dari 50. Menurut perhitungan kontribusi pendapatan transfer yang besar terhadap pendapatan daerah, ketergantungan daerah Kabupaten Gowa sangat besar. Rasio kemandirian daerah berkisar antara 0-25%, yang berarti kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Gowa dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif selama lima tahun. Analisis rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa rata-rata angkanya adalah lebih dari 100%, yang menunjukkan bahwa kriterianya sangat efektif dalam pengelolaan PAD. **Kesimpulan:** Penyelesaian masalah dapat dilakukan meningkatkan dan memperluas sumber atau komponen pendapatan sesuai dengan potensi yang ada, mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya normatif yang memperbaiki tata kelola pemungutan pendapatan asli daerah.

**Kata kunci:** Analisis; Analisis Rasio Keuangan; Kinerja Keuangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era digitalisasi saat ini, pemerintah dengan rakyat pada dasarnya sudah menjadi suatu ikatan yang tidak bisa lagi dilepaskan dan dapat dikatakan sebagai hubungan mutlak. Bertepatan dengan kemajuan digitalisasi diharapkan dapat mengubah paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan seimbang. Perubahan paradigma ini diwujudkan melalui desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan tiap daerah dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia (Lambelanova, Jaelani, dan KDP, 2022).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dilakukan perubahan dalam UU No. 9 Tahun 2015. Aturan diatas menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di mana pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dapat berjalan optimal apabila pembiayaan dan penerimaan yang dilakukan pemerintah seimbang dan sesuai. Jati (2012) menyebutkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang setengah hati dan berada dipersimpangan jalan tentu saja harus dikembalikan ke koridor yang sesungguhnya.

Pemerintah daerah dapat berkembang dengan baik jika diiringi dengan fokus terhadap penggalan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Triarda dan Damayanti, 2021). Penggalan akan potensi daerah dapat menjadikan daerah lebih mandiri untuk melaksanakan program-program tanpa adanya bantuan transfer pendapatan dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi daerah serta mengolahnya secara efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan pemerintah daerah guna mendukung desentralisasi dan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

terdapat penjelasan bahwa pemerintah pusat bertanggungjawab dan berperan dalam desentralisasi keuangan pemerintah daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Dimana Pemerintah pusat memiliki kewajiban dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui transfer ke daerah. Namun, pemerintah daerah harus sadar bahwa pemerintah pusat hadir sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan pemerataan pembangunan yang lebih baik. Salah satu indikator makro pembangunan daerah yang sering diamati selama ini peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di suatu daerah yang kesemuanya dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan di daerah yang menggunakan instrumen APBD.

Pemerintah daerah Kabupaten Gowa sebagai kabupaten yang paling dekat dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah penyangga aktivitas ekonomi Kabupaten Gowa sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya pun hampir menyamai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa. Namun, pembangunan manusianya ternyata jauh tertinggal dari Kabupaten Gowa. Pada Tahun 2022, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Gowa, Palopo, dan Pare-pare menempati urutan pertama, kedua dan ketiga IPM tertinggi, sedangkan Kabupaten Gowa berada di urutan ke-11 dari 24 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Urutan tersebut masih sama dengan tahun 2021. Akan tetapi, pertumbuhan IPM kabupaten Gowa pada tahun 2022 yang meningkat menjadi sebesar 0,70 persen dari pada tahun 2021.

Salah satu indikator lain pembangunan makro daerah mencakup tentang pengelolaan keuangan anggaran dan realisasi pendapatan pemerintah kabupaten Gowa dalam membiayai pemerataan pembangunan di daerah. Dengan pembangunan di daerah ini juga merupakan salah satu bentuk dalam menilai kinerja keuangan yang ada pada pemerintah kabupaten Gowa. Berikut adalah tabel anggaran dan realisasi APBD pemerintah kabupaten Gowa :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018-2022**

Tahun	Target Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	%
2018	1.785.653.795.674	1.781.396.471.000	99,76
2019	1.872.059.870.736	1.870.608.908.441	99,92
2020	1.854.204.401.136	1.883.817.390.606	101,60
2021	1.855.081.611.018	1.876.590.013.141	101,16
2022	1.760.456.992.472	1.780.968.775.258	101,17

*Sumber: BPKAD Kabupaten Gowa (LRA Tahun 2018-2022)*

Berdasarkan data diatas, nampak adanya fluktuasi antara target dan realisasi pendapatan daerah tetapi kinerja indikator pembangunan tetap positif dari tahun ke tahun. Tentunya kinerja ini akan lebih baik lagi apabila APBD dikelola melalui rasio belanja yang tepat sesuai fungsinya. Kinerja yang ditunjukkan ini antara lain karena pengelolaan APBD Kabupaten Gowa dalam rangka memenuhi fungsi anggaran terutama fungsi alokasi (pertumbuhan ekonomi), fungsi distribusi (peningkatan kesejahteraan) dan fungsi stabilisasi (keberlanjutan). Nilai realisasi APBD pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.876.590.013.141 dalam hal ini menurun 0,44 % dari realisasi APBD tahun sebelumnya sebesar Rp.1.883.817.390.605. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kontraksi perekonomian yang terjadi di semua daerah termasuk Kabupaten Gowa hingga tingkat nasional bahkan global akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu, pemerintah kabupaten Gowa harus mengambil langkah preventif dalam peningkatan kinerja keuangan berupa pengelolaan keuangan yang lebih baik dan tepat sehingga meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil pengelolaan data kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dan penurunan yang berkala pada total pendapatan daerah Kabupaten Gowa. Dalam hal yang sama, kontribusi dana perimbangan atau pendapatan transfer pemerintah pusat lebih besar daripada pendapatan daerah Kabupaten Gowa. Kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai 66%, menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat sangat membantu menjalankan urusan otonomi daerah. Pemerintah kabupaten Gowa pada dasarnya perlu menekan angka transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

**Tabel 1.2**  
**Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)	Dana Perimbangan (Rp.)	Kontribusi Pendapatan Transfer(%)
2018	1.781.396.471.000	1.237.082.857.147	69,44
2019	1.870.608.908.441	1.258.904.850.116	67,29
2020	1.883.817.390.606	1.217.293.801.285	64,61
2021	1.876.590.013.141	1.230.751.811.269	65,58
2022	1.780.968.775.258	1.230.272.383.324	69,07

Sumber: BPKAD Kabupaten Gowa, 2018-2022

Kabupaten Gowa dalam hal ini belum dikatakan bahwa mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah tanpa adanya pendapatan transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan). Namun, perlu dipahami bersama bahwa dalam menopang dan mendukung urusan pemerintahan itu harus dilengkapi dengan keuangan yang cukup untuk membiayai proses keuangan di Kabupaten Gowa. Pembiayaan proses keuangan yang baik juga akan mempercepat pembangunan fasilitas infrastruktur. Dimana hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten Gowa.

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
2018	1.781.396.471.000	217.112.642.503	12,18
2019	1.870.608.908.441	238.239.570.974	12,73
2020	1.883.817.390.606	241.469.600.865	12,81
2021	1.876.590.013.141	260.885.833.358	13,90
2022	1.780.968.775.258	265.326.827.151	14,89

Sumber: BPKAD Kabupaten Gowa, 2018-2022

Selain itu, berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan secara terus menerus. Meskipun dalam pendapatan daerah terjadi kenaikan dan penurunan secara berkala. Namun, apabila dilakukan perbandingan pendapatan daerah dengan

pendapatan asli daerah (PAD), maka kontribusi yang bisa diberikan pendapatan asli daerah yaitu rata-ratanya sebesar 13%.

Perbandingan antara kedua pendapatan tersebut bisa diartikan bahwa pendapatan transfer lebih besar dengan pendapatan asli daerah. Dari data yang didapat menunjukkan perbandingan angka antara keduanya yaitu 66% untuk kontribusi dana perimbangan dan 13% untuk pendapatan asli daerah dari kabupaten Gowa. Perbandingan kedua kontribusi ini sudah menunjukkan contoh permasalahan kabupaten Gowa belum bisa secara optimal mendanai pelaksanaan otonomi daerah tanpa adanya pendapatan transfer pemerintah pusat. Hal ini tergambarkan oleh kebiasaan kabupaten Gowa yang terlihat masih bergantung pada dana perimbangan atau pendapatan transfer pemerintah pusat.

**Tabel 1.4**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Rp.)</b>	<b>Retribusi Daerah (Rp.)</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp.)</b>	<b>Lain-Lain Pad Yang Sah (Rp.)</b>
<b>2018</b>	109.361.985.000	74.468.416.778	3.879.102.074	38.403.138.651
<b>2019</b>	112.451.239.497	79.360.883.550	4.906.988.917	41.460.309.010
<b>2020</b>	115.543.741.226	66.507.429.022	4.342.158.893	55.076.271.723
<b>2021</b>	133.952.261.485	49.614.791.303	4.069.728.564	73.249.052.005
<b>2022</b>	148.268.572.233	68.570.249.968	3.932.255.747	44.555.749.203

**Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022**

*Sumber: BPKAD Kabupaten Gowa, 2018-2022*

Data selanjutnya menunjukkan bahwa yang memiliki nilai tertinggi yaitu pajak daerah dengan tiap tahunnya mengalami kenaikan angka. Namun, Pada retribusi daerah tahun 2020 sempat mengalami penurunan dengan nilai Rp. 66.507.429.022 dan turun lagi sebesar Rp. 49.614.791.303 di tahun 2021 karena terdampak masa pandemi Covid-19. Tak hanya itu, penurunan angka terjadi pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mengalami penurunan setiap tahunnya. Bagian tersebut juga merupakan dampak dari pandemi covid-19. Pemerintah kabupaten Gowa harusnya mampu menggali potensi retribusi daerah dengan memberikan bantuan berupa pinjaman terhadap pelaku usaha UMKM yang terkena dampak guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Permasalahan ini menjadikan kinerja keuangan kabupaten Gowa diduga belum optimal dalam mengolah sumber pendapatan asli daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Gowa pada tahapannya masih mengalami masalah seperti kontribusi pendapatan asli daerah belum efektif dan efisien sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat kinerja keuangan daerah, apabila masalah diatas tidak ditindaklanjuti. Maka, Pemerintah kabupaten Gowa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, perlu dilaksanakan peninjauan dalam meningkatkan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Gowa. Selain itu, analisis rasio keuangan diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gowa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Fitriani Saragih dan Ilda Azilla Siregar berjudul Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Tahun 2014-2019) (Saragih dan Siregar, 2020), menemukan pemerintah Kota Tebing Tinggi rasio efektivitas dikategorikan sangat rendah disebabkan pada tahun 2014 sebesar 17,06%, tahun 2015 naik sebesar 17,82%, tahun 2016 turun jadi 16,86%, tahun 2017 naik lagi jadi 19,97%, tahun 2018 naik sebesar 21,08% dan turun lagi pada tahun 2019 sebesar 19,23%. Dari angka diatas dapat ditemukan bahwa pemerintah kota Tebing Tinggi belum mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya. Penelitian Ika Nurhayati Putri menemukan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi sangat rendah dikarenakan hanya berada pada angka 7,87%. Rasio ketergantungan Kabupaten Serang juga masih rendah karena rata-ratanya hanya sebesar 60,15%. Pemerintah kabupaten Serang dalam kemandirian daerah masih dalam kategori kurang dengan pola hubungan instruktif dan konsultif hanya berada skala 0%-50%. Artinya pemerintah daerah kabupaten Serang belum mandiri dikarenakan peranan dari pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah (Putri, 2018). Penelitian Deuis Kartika dan Indra Cahya Kusuma menemukan bahwa rasio kemandirian kabupaten Sukabumi mendapat predikat sangat rendah dikarenakan hanya mencapai angka 5,6% yang menunjukkan nilai sangat rendah. Namun, kabupaten Sukabumi dalam rasio efektivitasnya mencapai rata-rata sebesar 105,6% angka ini menunjukkan sangat efektif. Tak hanya itu, rasio efisiensi diklasifikasikan sebagai predikat sangat efisien dikarenakan mencapai angka rata-rata setiap tahunnya sebesar 5% (Kartika dan Kusuma, 2015). Selanjutnya, penelitian Dyah Palupi, Dassaad, Riyanti, dan Budi Wahyudi berkaitan dengan analisis kinerja keuangan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19 tahun 2019-2021 menemukan bahwa secara keseluruhan, kinerja keuangan Kepulauan Riau dinilai baik dengan desentralisasi fiskal sedang, pola partisipatif yang mengarah pada otonomi daerah, efektivitas dan efisiensi yang tinggi, belanja operasional yang fluktuatif namun positif, serta pertumbuhan pendapatan yang positif namun menurun akibat pandemi COVID-19 (Palupi, Dassaad, Riyanti, dan Wahyudi, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Mandua, Numberi, dan Werimon tentang kinerja keuangan Kabupaten Teluk Wondama dari tahun 2017-2021 ditemukan bahwa terjadi fluktuasi dalam penerimaan PAD, dengan rasio desentralisasi dan kemandirian keuangan yang sangat kurang, sehingga masih bergantung pada dana pusat, meskipun rasio efisiensi menunjukkan hasil yang efisien namun tidak efektif (Mandua, Numberi, dan Werimon, 2023).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni analisis kinerja keuangan dalam meningkatkan pendapatan daerah, lokus yang digunakan adalah Kabupaten Gowa yang berbeda dengan penelitian Saragih dan Siregar (2020), Putri (2018), Kartika dan Kusuma (2015), Palupi, Dassaad, Riyanti, dan Wahyudi (2022), maupun Mandua, Numberi, dan Werimon (2023). Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mahmudi yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Rasio tersebut terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, dan rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2019).

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dalam meningkatkan pendapatan daerah, mengetahui faktor penghambat analisis kinerja keuangan dalam meningkatkan pendapatan daerah, dan mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan kinerja keuangan guna meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif, bahwa data dan fakta dari penelitian ini berasal dari data dan fakta yang sifatnya khusus lalu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum (Simangunsong, 2017) dengan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini mencakup analisis angka dalam data sekunder yang didukung oleh penjelasan yang diberikan melalui wawancara (Sugiyono, 2016).

Selama proses pengumpulan data, terdapat tiga pendekatan yang digunakan oleh peneliti dan dilakukan secara langsung dengan metode penelitian kualitatif yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 8 orang informan melalui teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan Kepala Bidang Aset Daerah. Adapun analisisnya menggunakan teori analisis rasion oleh Mahmudi (2019) yang terdiri dari 4 rasio penilaian, yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan, dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gowa**

Kinerja keuangan daerah kabupaten Gowa dapat dinilai melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih khusus pada tahun 2018-2022. Hasil wawancara telah dilakukan dengan Kepala BPKAD sekaligus menjabat sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah Kabupaten Gowa yaitu Bapak Karim Dania. Beliau menjelaskan bahwa dalam 5 tahun anggaran terakhir (2018-2022) menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer. ketimpangan yang terjadi menggambarkan pemasukan pendapatan transfer pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.

Gambaran terkait penjelasan tersebut disampaikan Bapak H. Abdul Karim Dania, S.E, MM, merupakan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Gowa dalam wawancara yaitu:

“Selama lima tahun pelaksanaan anggaran, APBD Kabupaten Gowa sudah dapat dianggap cukup untuk membiayai program pemerintah dalam situasi sulit seperti pandemi COVID-19 kemarin. Mengenai masalah ini, pemerintah Kabupaten Gowa menggunakan pendapatan transfer untuk mendanai. Ini membuat pemerintah tetap stabil dalam membiayai program kegiatan”.

Berdasarkan gambaran yang diberikan oleh Kepala BPKD Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa terdapat peran dan fungsi Pendapatan Transfer dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Peran dan fungsi tersebut dilakukan dalam mendanai program kabupaten Gowa dalam satu tahun

periode. Sangat penting untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui seberapa besar kinerja keuangan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan potensinya. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

### 3.1.1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD untuk mendanai otonomi daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut rumus tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digambarkan dengan jelas berdasarkan tingkat desentralisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa. Berikut table anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018-2022:

**Tabel 3.1**

**Tabel Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah
2018	217.112.642.503	1.781.396.471.000
2019	238.239.570.974	1.870.608.908.440
2020	241.469.600.865	1.883.817.390.605
2021	260.885.833.358	1.876.590.013.141
2022	265.326.827.151	1.780.968.775.257

Sumber: BPKD Kabupaten Gowa, 2018-2022

Perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

$$2018 = \frac{217.112.642.503}{1.781.396.471.000} \times 100\% = 12,18\%$$

$$2019 = \frac{238.239.570.974}{1.870.608.908.440} \times 100\% = 12,73\%$$

$$2020 = \frac{241.469.600.865}{1.883.817.390.605} \times 100 = 12,81\%$$

$$2021 = \frac{260.885.833.358}{1.876.590.013.141} \times 100\% = 13,90\%$$

$$2022 = \frac{265.326.827.151}{1.780.968.775.257} \times 100\% = 14,89\%$$

Berdasarkan analisis perhitungan rasio yang dilakukan terhadap desentralisasi fiskal di kabupaten Gowa yaitu tidak kurang dari 15%. Dalam 5 tahun sesuai anggaran tahun 2018-2022 terhadap derajat desentralisasi fiskal berkisar 10,01% - 15,00%. Berarti dalam tingkat kisaran tersebut Derajat desentralisasi fiskal kabupaten Gowa dikategorikan rendah.

Berikut merupakan grafik derajat desentralisasi fiskal kabupaten Gowa tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022:



**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

*Sumber: Diolah Penulis, 2024*

Anggaran derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Gowa meningkat secara signifikan selama lima tahun, meskipun perhitungan rasio belum mencapai 15%, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Peningkatan yang terbaik terjadi pada tahun 2021 dimana peningkatan angkanya sebesar 1,09%. Meskipun, pada tahun yang sama pemerintah daerah yang lain mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Gowa mampu menghadapi dampak covid-19. Keadaan selama 5 tahun atas derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Gowa sangat dipengaruhi oleh kontribusi PAD yang meningkat. Peningkatan presentase realisasi PAD sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 merupakan suatu keberhasilan yang dialami kabupaten Gowa dalam melawan dampak pandemi covid-19.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bapak H. Karim Dania, S.E, MM, beliau menjelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gowa dalam menjalankan desentralisasi fiskal dengan penuh waspada. Hasil dari perhitungan rasio yang menunjukkan desentralisasi fiskal Kabupaten Gowa dikategorikan rendah. Maka, anggaran Kabupaten Gowa harus digunakan secara efisien dan efektif. Rencana program pembangunan Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan rapat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah terkait atau pihak ketiga pelaksana pembangunan untuk bisa memaksimalkan pembangunan dengan anggaran yang ada.

Singkatnya, desentralisasi fiskal yang diterapkan pada kinerja keuangan Kabupaten Gowa menuntut pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah defisit anggaran penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, kinerja keuangan harus dilaksanakan dengan efektif karena anggaran penyelenggaraan pemerintah sudah menjadi kewajiban. Agar kinerja keuangan berhasil, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diperhatikan saat melaksanakannya.

### 3.1.2. Rasio Ketergantungan Daerah

Tujuan dari rasio ketergantungan keuangan daerah adalah untuk mengetahui seberapa tergantung daerah keuangan terhadap pendapatan eksternal, terutama pendapatan transfer. Untuk mengetahui rasio ketergantungan keuangan daerah, Anda harus membandingkan pendapatan transfer daerah dengan pendapatan total. Hasil perhitungan kemandirian daerah dapat ditingkatkan melalui penggunaan pengukuran. Untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi, gunakan rumus berikut. Hasil rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah semakin rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, perbandingan antara pendapatan transfer dan total pendapatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah. Berikut tabel pendapatan transfer dan total pendapatan daerah kabupaten Gowa tahun 2018-2022:

**Tabel 3.2**  
**Tabel Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah
2018	1.477.952.776.948	1.781.396.471.000
2019	1.542.776.177.465	1.870.608.908.440
2020	1.396.731.032.740	1.883.817.390.605
2021	1.504.212.221.783	1.876.590.013.141
2022	1.503.052.148.106	1.780.968.775.257

Sumber: BPKD Kabupaten Gowa, 2018-2022

Perhitungan dan hasil rasio ketergantungan daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

$$2018 = \frac{1.477.952.776.948}{1.781.396.471.000} \times 100\% = 82,96\%$$

$$2019 = \frac{1.542.776.177.465}{1.870.608.908.440} \times 100\% = 82,47\%$$

$$2020 = \frac{1.396.731.032.740}{1.883.817.390.605} \times 100\% = 74,14\%$$

$$2021 = \frac{1.504.212.221.783}{1.876.590.013.141} \times 100\% = 80,15\%$$

$$2022 = \frac{1.503.052.148.106}{1.780.968.775.257} \times 100\% = 84,39\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio atas ketergantungan daerah di Pemerintah kabupaten gowa menunjukkan angka yang tinggi. Angka pada hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah

kabupaten gowa menunjukkan angka rata-rata sebesar 80% secara keseluruhan. Hasil ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan kriteria ketergantungan termasuk. Kontribusi Pendapatan Transfer, menurut hasil perhitungan rasio, termasuk dalam kelompok yang memiliki presentase lebih dari 50,00. Perhitungan kontribusi pendapatan transfer yang tinggi terhadap pendapatan daerah menunjukkan ketergantungan daerah kabupaten Gowa yang sangat besar. Hal ini terlihat dari Pemerintah kabupaten Gowa masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer yang dimilikinya. Berikut merupakan grafik Ketergantungan Daerah kabupaten Gowa tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022:



**Gambar 3.2**  
**Perbandingan Rasio Ketergantungan Daerah**

*Sumber: Diolah Penulis, 2024*

Gambaran grafik di atas menunjukkan perkembangan ketergantungan daerah selama lima tahun. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan dan penurunan. Ketergantungan daerah tahun 2018 dengan angka 82,96%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan presentase ketergantungan sebesar 82,47%. Tahun 2020 mengalami penurunan yang tinggi sebesar 74,14%. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,01% dengan angka 80,15%. Pada tahun 2022 Pemerintah kabupaten Gowa mengalami peningkatan ketergantungannya dengan angka 84,39%.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang Anggaran Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Bapak Emil Wiriadinata, S.E, dikatakan bahwa kondisi ketergantungan keuangan Kabupaten Gowa tergolong sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya kontribusi pendapatan transfer atas kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. keadaan ini telah terjadi selama 5 tahun mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Ketergantungan Kabupaten Gowa yang sangat tinggi harus diselesaikan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Gowa menyusun peraturan daerah terbaru mengenai pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Gowa atas pendapatan transfer. Upaya yang dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang panjang bagi Pemerintah Kabupaten Gowa agar bisa mandiri kedepannya.

### 3.1.3. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana eksternal, yang termasuk transfer pusat, provinsi, dan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menentukan rasio ini, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Gowa dibandingkan dengan PAD dari pihak eksternal.

Transfer dana pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah lainnya merupakan pendapatan eksternal. Transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan adalah contoh pendapatan transfer. Rasio kemandirian daerah yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan luar. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap bantuan luar yang lebih tinggi.

Pajak merupakan komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan seberapa sering masyarakat membayar pajak dan retribusi dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah. Berikut rumus yang digunakan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan eksternal untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah. Ini dilakukan dengan menggunakan rumus di atas, yang menunjukkan bahwa PAD berfungsi sebagai standar untuk kemandirian keuangan daerah. PAD akan dibandingkan dengan faktor lain, seperti pendapatan pemerintah luar daerah.

**Tabel 3.3**  
**Tabel Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Eksternal Kabupaten Gowa Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Eksternal (Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman)
2018	217.112.642.503	1.312.973.961.356
2019	238.239.570.974	1.360.788.047.865
2020	241.469.600.865	1.307.485.960.640
2021	260.885.833.358	1.369.674.786.928
2022	265.326.827.151	1.780.968.775.257

Sumber: BPKD Kabupaten Gowa, 2018-2022

Berikut adalah grafik dan perhitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Gowa selama 5 tahun:

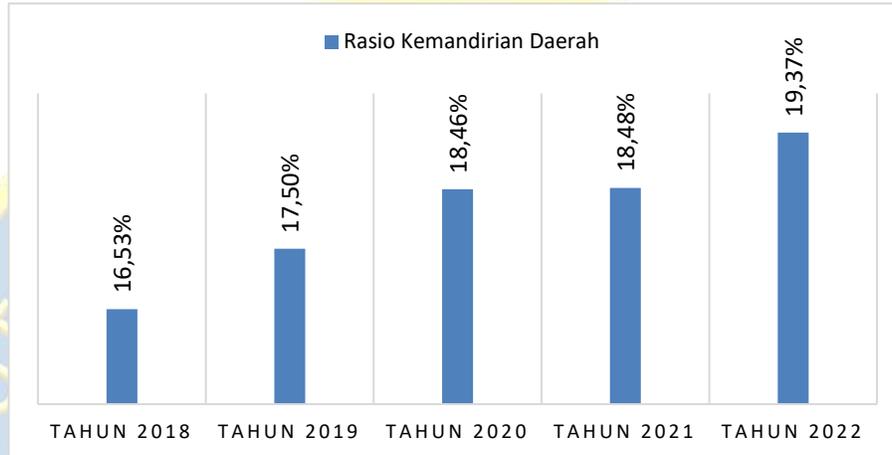
$$2018 = \frac{217.112.642.503}{1.312.973.961.356} \times 100\% = 16,53\%$$

$$2019 = \frac{238.239.570.974}{1.360.788.047.865} \times 100\% = 17,5\%$$

$$2020 = \frac{241.469.600.865}{1.307.485.960.640} \times 100 = 18,46\%$$

$$2021 = \frac{260.885.833.358}{1.411.479.987.069} \times 100\% = 18,48\%$$

$$2022 = \frac{265.326.827.151}{1.369.674.786.928} \times 100\% = 19,37\%$$



**Gambar 3.3**  
**Perbandingan Rasio Kemandirian Daerah**

*Sumber: Diolah Penulis, 2024*

Data di atas adalah hasil dari perhitungan rasio dan grafik tren kinerja keuangan Kabupaten gowa selama lima tahun. Hasil perhitungan rasio tahun keseluruhan menunjukkan angka antara 0-25%, yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah pemerintah Kabupaten gowa sangat rendah dengan pola hubungan instruktif selama lima tahun. Grafik kemandirian Kabupaten Gowa berkembang setiap tahun. Kemandirian daerah dimulai pada tahun 2018 dengan presentase sebesar 16,53%, naik lagi pada tahun 2019 dengan presentase sebesar 17,5%, dan naik lagi pada tahun 2020 dengan presentase sebesar 18,46%. Pada tahun 2021, presentase kemandirian daerah tetap meningkat tetapi hanya sebesar 0,2%, yang menunjukkan presentase sebesar 18,48%. Pada tahun 2022, presentase kemandirian daerah adalah 19,37%. Data diatas menunjukkan bahwa Kemandirian Kabupaten gowa dalam peningkatannya masih dapat dikatakan mengalami peningkatan angka kemandirian yang stabil akan tetapi berdasarkan perhitungan rasio Kemandirian pemerintah daerah Kabupaten gowa sangatlah rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset daerah Bapak Yusuf,S.E, M.M beliau menjelaskan bahwa Kabupaten gowa masih mampu menghadapi pandemi covid-19. Solusi untuk kekurangan dana pemerintahan Kabupaten Gowa adalah dengan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan. Dengan upaya ini, kinerja keuangan akan ditingkatkan untuk mencapai kemandirian Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa memiliki banyak potensi kemandirian keuangan karena statusnya sebagai kabupaten penyanggah ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja keuangan Kabupaten Gowa saat ini yang telah mencapai kategori kemandirian keuangan sedang memiliki niat yang baik untuk mewujudkan kemandirian keuangan yang lebih besar bagi Kabupaten Gowa.

### 3.1.4. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan seberapa baik kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan daerah yang telah direncanakan, sehingga realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jika rasio efektivitas tersebut tinggi, maka kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya semakin baik. Untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah, rumus berikut digunakan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Cara untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rumus yang digunakan adalah untuk membandingkan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Grafik berikut menunjukkan perhitungan rasio dan kinerja PAD selama lima tahun:

$$2018 = \frac{217.112.642.503}{208.160.896.819} \times 100\% = 104,3\%$$

$$2019 = \frac{238.239.570.974}{226.383.699.880} \times 100\% = 105,24\%$$

$$2020 = \frac{241.469.600.865}{228.174.016.623} \times 100 = 105,83\%$$

$$2021 = \frac{260.885.833.358}{236.598.766.548} \times 100\% = 110,27\%$$

$$2022 = \frac{265.326.827.151}{250.890.698.571} \times 100\% = 105,75\%$$

Hasil data diatas merupakan perhitungan rasio dan grafik tren selama 5 tahun atas Efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten gowa. Hasil perhitungan rasio menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun, terjadi penurunan ditahun 2022. Pada tahun 2018 rasio efektifitas menunjukkan angka 104,3%. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan angka sebesar 105,24%. Tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 105,83%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan angka efektivitas pengelolaan PAD sebesar 110,27%. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,47% yang berada pada angka 105,75%. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan PAD kabupaten gowa dikategorikan cukup efektif.



**Gambar 3.4**  
**Perbandingan Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD**

*Sumber: Diolah Penulis, 2024*

Berdasarkan wawancara dilakukan kepada Kepala bidang akuntansi yaitu ibu Ramdhani Utamy Muchtar, S. STP, M.Si mengenai rasio tersebut, beliau menjelaskan bahwa kondisi pengelolaan pendapatan asli daerah pemerintah daerah Kabupaten Gowa masih tergolong baik dikarenakan mampu menyesuaikan dengan tantangan ekonomi dari dampak pandemi covid-19.

Pemerintah daerah Kabupaten Gowa menjawab tantangan ekonomi pandemi covid-19 tersebut dengan memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha kecil dan menengah serta memberikan bantuan modal usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah.

### **3.2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengumpulkan semua Pendapatan Asli Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan menghadapi banyak tantangan. Cobaan yang muncul setiap tahun menjadi hambatan tersendiri bagi kinerja keuangan daerah dalam memenuhi potensi daerah. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Gowa :

#### **- Pengawasan Pemungutan yang Rendah**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Gowa Ibu Ramdany Muchtar, S.STP, M. Si. menunjukkan bahwa salah satu faktor pemungutan yang rendah. Karena kurangnya pengawasan, pendapatan asli daerah masih belum dioptimalkan. Untuk memantau pelaksanaan penghimpunan potensi daerah, pengawasan yang dilakukan sebagai kepastian PAD sangat penting. Selain itu, selama 5 tahun pendapatan retribusi daerah Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi angka. Fluktuasi angka ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah kabupaten gowa dilapangan. Pemerintah kabupaten gowa masih menerapkan konsep pelayanan lama. Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai komponen yang menjemput bola. Maksudnya, pemerintah harus membuat tim khusus yang langsung turun memberikan pelayanan pemungutan yang simpel.

#### **- Proses Administrasi Pemungutan yang Berbelit**

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah Bapak Andi Yasser Cipta Nur, S.Sos, MM. mengenai masalah ini, diketahui bahwa

banyak masyarakat yang menunda untuk memenuhi kewajiban retribusi karena masalah administrasi yang kompleks. Metode dan prosedur yang digunakan untuk memenuhi kewajiban retribusi didokumentasikan secara menyeluruh dan menurut masyarakat sangat cepat, yang menyebabkan masyarakat menunda kewajiban tersebut. Hasilnya, retribusi di Kabupaten Gowa sangat rendah.

- **Ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer**

Pemerintah Kabupaten Gowa menghadapi tantangan untuk meningkatkan pendapatannya karena Pendapatan Transfer telah menjadi bagian dari pendapatan daerah. Salah satu kendalanya adalah pemerintah Kabupaten Gowa mulai bergantung pada pendapatan transfer untuk mengatasi kekurangan anggaran. Dengan mempertimbangkan titik ketergantungan ini, kinerja keuangan tidak berfungsi dengan baik untuk menggabungkan potensi daerah. Kondisi ketergantungan dengan pendapatan yang tidak mencapai target telah dijawab oleh tren lima tahun atas Pendapatan Asli daerah. Hasilnya, meskipun ada potensi untuk mengoptimalkannya, Pendapatan Asli Daerah tetap terlepas.

### **3.3. Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah**

Dengan ditemukannya beberapa hambatan dalam menjalankan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa ini, pemerintah menandakan perlunya pemerintah daerah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Berikut ini berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengatasi hambatan tersebut.

- **Optimalisasi Penerimaan PAD dengan Meningkatkan dan Memperluas Sumber Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Upaya untuk meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan asli daerah yang sah dilakukan untuk mencapai optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari subjek dan objek yang terdaftar dan dengan meningkatkan target jumlah wajib pajak yang terdaftar.

- **Upaya Normatif**

Upaya normatif yang dilakukan berupa pembuatan peraturan daerah untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan proses pemungutan retribusi. Pemerintah daerah Kabupaten Gowa berharap melalui upaya ini akan meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja keuangan.

- **Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Upaya ini dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gowa ialah melalui sosialisasi mengenai pembayaran wajib pajak dapat dilakukan via *online* melalui web [pajakonline.gowakab.go.id](http://pajakonline.gowakab.go.id). pemerintah daerah Kabupaten Gowa telah memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memudahkan bagi para wajib pajak untuk melakukan pembayaran dari mana saja.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdampak positif dalam mengetahui kondisi serta posisi keuangan yang ada. Penulis menemukan temuan penting yakni Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi dalam peningkatan PAD. Namun, potensi-potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Karena, pemerintah daerah ragu meningkatkan pajak, retribusi dan investasi lainnya. Sama halnya dengan temuan Saragih dan Siregar (2020) bahwa bahwa pemerintah kota Tebing Tinggi belum mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya.

Secara mandiri, Pendapatan Asli Daerah kabupaten Gowa pada dasarnya mengalami

peningkatan tiap tahunnya dan masih bisa ditingkatkan lebih baik dengan mendalami potensi optimalisasi pendapatan asli daerah dengan pembaharuan peraturan daerah kabupaten Gowa Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, penelitian Putri (2018) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten Serang belum mandiri dikarenakan peranan dari pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah, layaknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandua, Numberi, dan Werimon (2023) bahwa terjadi fluktuasi dalam penerimaan PAD, dengan rasio desentralisasi dan kemandirian keuangan yang sangat kurang, sehingga masih bergantung pada dana pusat, meskipun rasio efisiensi menunjukkan hasil yang efisien namun tidak efektif. Selain itu, penulis menemukan bahwa Kabupaten Gowa memiliki banyak potensi kemandirian keuangan karena statusnya sebagai kabupaten penyanggah ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja keuangan Kabupaten Gowa saat ini yang telah mencapai kategori kemandirian keuangan sedang memiliki niat yang baik untuk mewujudkan kemandirian keuangan yang lebih besar bagi Kabupaten Gowa, hal ini selaras dengan hasil temuan Palupi, Dassaad, Riyanti, dan Wahyudi (2022) bahwa secara keseluruhan, kinerja keuangan Kepulauan Riau dinilai baik dengan desentralisasi fiskal sedang, pola partisipatif yang mengarah pada otonomi daerah, efektivitas dan efisiensi yang tinggi, belanja operasional yang fluktuatif namun positif, serta pertumbuhan pendapatan yang positif.

Adanya analisis ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu secara berkelanjutan memenuhi dan meningkatkan kinerja keuangan, serta mampu menjadi pilar yang kokoh dalam mengembangkan serta memajukan Kabupaten Gowa di masa depan, layaknya Penelitian Deuis Kartika dan Indra Cahya Kusuma menemukan bahwa Kabupaten Sukabumi dalam rasio efektivitasnya mencapai rata-rata sebesar 105,6% angka ini menunjukkan sangat efektif. Tak hanya itu, rasio efisiensi diklasifikasikan sebagai predikat sangat efisien dikarenakan mencapai angka rata-rata setiap tahunnya sebesar 5% (Kartika dan Kusuma, 2015).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gowa sangat baik. Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Gowa untuk mendukung operasi pemerintahan daerah dikategorikan sedang. Pengujian rasio desentralisasi fiskal terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah selama lima tahun menunjukkan bahwa angka kategori presentase berkisar 10% hingga 15%. Perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Gowa terhadap perhitungan indikator Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah menunjukkan angka rata-rata sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan kriteria ketergantungan, hasil tersebut dianggap sangat tinggi. Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah menunjukkan angka berkisar 0-25%, yang berarti selama lima tahun kemandirian daerah Pemertahanan akan lebih baik. Menurut perhitungan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa, kriteria tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat efektif. dengan menunjukkan hasil rasio yang berkisar antara seratus persen ke atas. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja keuangan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Gowa, yaitu pengawasan pemungutan yang rendah, proses administrasi pemungutan yang berbelit, dan ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan, yaitu optimalisasi penerimaan PAD dengan meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan asli daerah yang sah, upaya normative berupa pembuatan perda, dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan utama dalam penelitian ini yakni waktu dan data penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, tanpa melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih berada pada tahap awal. Maka dari itu, penulis merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan terkait kinerja keuangan dalam meningkatkan pendapatan daerah di tempat yang sama atau di wilayah yang lebih luas untuk memperoleh temuan yang lebih baik dan mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- BPKAD Kabupaten Gowa. (2023). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun 2018-2022*. Kabupaten Gowa.
- BPS Sulawesi Selatan. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023*. Sulawesi Selatan.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Universitas Gadjah Mada: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23–34.
- Lambelanova, R., Jaelani, R., dan KDP, V. V. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. IPDN
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mandua, T. L.; Numberia, C. L.; Werimon, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017 - 2021. *Lensa Ekonomi*, [S.l.], v. 16, n. 02, p. 237 - 253, jan. 2023. ISSN 2623-0895. Available at: <<https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/lensa/article/view/249>>. Date accessed: 12 june 2024. doi: <https://doi.org/10.30862/lensa.v16i02.249>.
- Palupi, D., Dassaad, D., Riyanti, R., & Wahyudi, B. W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1819-1832. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2644>
- Putri, I. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. *Diploma atau S1 thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Saragih, F., & Siregar, I.A. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 43-53.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT.Alfabeta.
- Triarda, R. dan Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 35-54. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.